

# Analisis Pengendalian Internal atas Siklus Pelaporan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Nita Winatasari Putri<sup>1</sup>, Siti Nurwahyuningsih Harahap<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Depok  
[nita.putri22@gmail.com](mailto:nita.putri22@gmail.com)

\*Corresponding Author

Diajukan : 1 Desember 2023  
Disetujui : 19 Desember 2023  
Dipublikasi : 1 Juli 2024

## ABSTRACT

*This research was conducted to analyze the implementation of internal control over the financial reporting cycle at the Ministry of Foreign Affairs, especially in the year of 2022 after all the ministries are obliged to implement the Agency Level Financial Application System referred as SAKTI. This research used a case study methodology with a qualitative descriptive data analysis on a single unit analysis by using the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission Internal Control-Integrated Framework (COSO) theoretical framework adjusted to PMK.17/PMK.09/2019. The data collection in this research was obtained through interviews, documentations and observations techniques which were processed and analyzed using the content analysis method using the Nvivo12 Pro application tool. The results show that the effectiveness of internal control plays an important role in the organization to present an accurate and accountable financial reports. The manual procedures in data recapitulation and journal record in SAKTI had an impact on the occurrence of human errors which causing the need of corrections to be made in the following periods. Based on the results, it is concluded that internal control over financial reporting cycle at the Ministry of Foreign Affairs has been implemented but it is still not effective, so it needs some improvements such as the need to digitize manual procedures in data recapitulation and journal interconnection in SAKTI and also optimize monitoring activities for accurate and accountable financial reports in the future.*

**Keywords:** Internal Control; Financial Reporting Cycle; SAKTI; COSO

## PENDAHULUAN

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang kemudian disebut dengan SAKTI adalah sistem aplikasi yang dibuat dan dikembangkan Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban APBN hingga proses laporan keuangan bagi kementerian/lembaga. Melalui PMK No. 171/PMK.05/2021, Kementerian Keuangan mewajibkan seluruh kementerian/lembaga untuk mengimplementasikan SAKTI sebagai bentuk keseragaman dalam pembukuan, perekaman transaksi dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan diberlakukannya SAKTI, dukungan terhadap prinsip pengelolaan keuangan pemerintah yang tertib, ekonomis, efisien dan efektif, akuntabel, transparan, berbasis kinerja serta terintegrasi dengan konsep *database* tunggal dapat terlaksana (Amriani & Iskandar, 2019).

Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) memiliki 144 satuan kerja (satker) yang tersebar pada 13 satker yang berkedudukan di Jakarta dan 131 satker perwakilan RI yang berkedudukan di luar negeri (Kementerian Luar Negeri, 2022). Keseluruhan satker Kemenlu telah menerapkan SAKTI dalam pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Bagi satker perwakilan RI luar negeri yang memiliki kekhususan karena berada di luar negeri, transaksi keuangan dilakukan dengan menggunakan mata uang asing sesuai dengan wilayah kerja satker tersebut.



SAKTI hingga saat ini baru dapat memfasilitasi mata uang asing dalam bentuk valuta USD, sehingga guna menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah diperlukan alat bantu yang berfungsi untuk mentranslasikan mata uang asing ke mata uang rupiah.

Untuk melakukan perhitungan translasi kurs, Kemenlu menggunakan kartu pengawas (karwas) untuk setiap jenis akun yang perlu disajikan dalam laporan keuangan. Karwas merupakan buku pembantu yang merekapitulasi secara manual data keuangan berdasarkan dokumen sumber yang dimiliki satker perwakilan RI luar negeri. Pembuatan karwas hanya dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan yaitu laporan keuangan semester I (disusun pada periode Juli tahun berjalan), laporan keuangan triwulan III (disusun pada periode Oktober tahun berjalan) dan laporan keuangan tahunan (disusun bulan Januari pada tahun berikutnya) (Menteri Luar Negeri, 2022).

Untuk perhitungan dan penyajian saldo akun pada laporan keuangan, Kemenlu berpedoman pada Permenlu No. 5 Tahun 2022 yang membahas mengenai Petunjuk Teknis Akuntansi pada Kementerian Luar Negeri dan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. S21/PB.6/2021 tentang Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan Kurs Penutup dimana dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Luar Negeri, penyajian pos-pos aset moneter dalam bentuk valuta asing ke valuta rupiah pada laporan keuangan menggunakan kurs penutup *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) yang disediakan melalui publikasi Bank Indonesia (BI).

Karwas dibuat dengan menggunakan *Microsoft Excel* yang telah diformat secara spesifik yang pengisiannya diatur sesuai dengan permenlu petunjuk teknis akuntansi. Prosedur pengisian data pada karwas masih dilakukan secara manual melalui kolom-kolom yang telah tersedia disesuaikan dengan data dukung yang ada yang selanjutnya diformulasi dengan rumusan yang akan menghasilkan jurnal dan akan dilakukan perekaman pada SAKTI. Dalam Permenlu tersebut, karwas mencakup karwas aset yang meliputi karwas kas bendahara pengeluaran, karwas kas bendahara penerimaan, karwas belanja dibayar di muka, karwas piutang lainnya, karwas kas besi, karwas deposit sewa, karwas pendapatan yang meliputi karwas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-Laporan Operasional (LO), dan karwas beban yang meliputi karwas transaksi akrual.

Hasil bentukan jurnal dari masing-masing karwas selanjutnya direkam dalam SAKTI modul *General Ledger* dan Pelaporan (GLP) dengan menggunakan menu jurnal manual. Berdasarkan data awal yang diperoleh, sebelum diberlakukannya SAKTI di tahun 2021, jumlah jurnal manual yang direkam oleh seluruh satuan kerja di Kemenlu berjumlah 10.053 jurnal, dan sejak penerapan SAKTI, pada tahun 2022 terdapat 13.371 jurnal manual yang dibuat oleh seluruh satuan kerja Kemenlu. Penggunaan SAKTI berpengaruh terhadap kenaikan jumlah jurnal manual yang dibuat oleh satker Kemenlu. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian atas data akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan dari tingkat satker, Kementerian Luar Negeri memiliki Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) yang bertugas untuk melakukan penelaahan data akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat kementerian (Menteri Luar Negeri, 2021). Evaluasi penelaahan data dilakukan dengan membandingkan antara dari dokumen sumber yang dapat berupa dokumen resmi seperti data kontrak, *bank statement*, faktur, kuitansi, surat keputusan, nota dinas, dan sebagainya

Perekaman data transaksi dalam kartu pengawas yang masih mempergunakan prosedur manual hingga perekaman jurnal manual di SAKTI berpotensi besar terhadap terjadinya kesalahan manusia (*human error*) yang berdampak kepada salah saji pada laporan keuangan Kementerian Luar Negeri. Salah saji dapat didefinisikan sebagai kekeliruan (*error*) yaitu ketidaksengajaan atas hilangnya nilai atau pengungkapan pada laporan keuangan misalnya kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data terkait akuntansi, kesalahan estimasi atas perlakuan akuntansi sebagai dampak dari kesalahan persepsi atas suatu keadaan, dan kekeliruan dalam menerapkan prinsip akuntansi (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021). Selain itu salah saji dapat didefinisikan sebagai ketidakteraturan (*irregularities*) yaitu kesengajaan atas tidak adanya pengungkapan ataupun hilangnya jumlah nilai dalam laporan keuangan, dapat berupa kecurangan dan penyalahgunaan aset (Mulyani & Suryawati, 2011).

Sejak tahun 2016 hingga 2022 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemenlu. Meski demikian, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI beberapa tahun terakhir atas Laporan Keuangan Kemenlu, masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internal pada proses

penyusunan laporan keuangan yang meningkatkan risiko kemungkinan adanya kesalahan penyajian pada laporan keuangan Kemenlu. Salah satunya berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap perhitungan dan penyajian saldo beberapa akun di laporan keuangan yang kurang optimal (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maksud dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal yang telah diterapkan oleh Kemenlu atas fenomena prosedur manual pada karwas dan penggunaan jurnal manual serta bagaimana efektivitas atas pengendalian internal yang telah dilakukan oleh Kemenlu selama ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengendalian internal atas siklus pelaporan telah diterapkan Kemenlu dan menganalisis efektivitas siklus pelaporan keuangan Kemenlu.

Studi terkait dengan penelitian ini masih bersifat terbatas mengingat implementasi SAKTI untuk seluruh kementerian/lembaga baru dilakukan di tahun 2022 sehingga penelitian yang telah ada umumnya berfokus pada proses implementasi SAKTI seperti studi yang dilakukan oleh (Ramdany & Yusuf Setiawan, 2021) terkait analisis atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dimana salah satunya juga membahas mengenai pengendalian internal pada SAKTI namun lebih berfokus pada Laporan Keuangan Pemerintah. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Anwar & Hadi, 2022) yang melakukan penelitian terkait dengan implementasi SAKTI dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) serta hubungannya pada penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga. Sementara pada penelitian lainnya, (Prabowo, 2017) membahas mengenai analisis SAKTI dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM). Hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan kendala-kendala dalam implementasi SAKTI, kemanfaatan dan kemudahan SAKTI dalam penyusunan laporan keuangan dan hubungan implementasi SAKTI dengan pengendalian internal yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan referensi pengetahuan dan memberikan manfaat baik manfaat akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya sebagai pengembangan literatur dan manfaat praktis terhadap organisasi sebagai alternatif solusi dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan Kemenlu serta bagi institusi pemerintah lainnya yang memiliki permasalahan serupa.

## STUDI LITERATUR

### Siklus Pelaporan dan Pengendalian Internal

SAKTI merupakan bentuk dari Sistem Informasi Akuntansi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dengan konsep *database* tunggal yang berlaku secara nasional. SAKTI merupakan bentuk dari Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang merupakan sistem yang berkaitan dengan pengumpulan, perekaman, penyimpanan dan proses data untuk menghasilkan data dan informasi untuk pembuat keputusan. SIA mencakup komponen-komponen seperti sumber daya manusia (SDM), perangkat lunak, prosedur serta instruksi data, pengendalian internal, infrastruktur terkait teknologi informasi, serta langkah pengamanan. (Romney et al., 2021)

Dalam penerapannya, SIA mencakup beberapa siklus-siklus transaksi yang terbagi atas siklus transaksi pendapatan, siklus transaksi pengeluaran, siklus transaksi produksi, siklus transaksi penggajian atau Sumber Daya Manusia (SDM), serta siklus pelaporan. (Romney et al., 2021). Siklus pelaporan atau *General Ledger and Reporting System* (GLRS) merupakan siklus final dari keseluruhan siklus dalam SIA. Siklus pelaporan dapat didefinisikan sebagai kegiatan penyusunan laporan keuangan yang meliputi prosedur pencatatan transaksi hingga perekaman jurnal ke buku besar yang untuk selanjutnya akan tersaji dalam laporan keuangan (Putranto, 2020).

Penerapan SIA mencakup mekanisme pengendalian internal yang didefinisikan sebagai proses dan prosedur yang telah diimplementasikan guna memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian telah terpenuhi. Salah satu kerangka kerja yang digunakan dalam pengendalian internal adalah kerangka kerja *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) untuk mendefinisikan dan memberikan panduan dalam melakukan evaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internal, serta kewenangan yang diterima atas pengendalian internal yang termasuk dalam aturan ataupun kebijakan, dan dapat digunakan untuk pengendalian kegiatan bisnis (Romney et al., 2021).

Pengertian pengendalian internal dalam lingkup institusi pemerintahan dapat merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008, dimana pengendalian internal dapat diinterpretasikan sebagai prosedur integral atas tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh level pimpinan dan seluruh pegawai secara berkelanjutan guna memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi melalui aktivitas dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, keandalan atas laporan keuangan, pengamanan terhadap aset negara, dan kepatuhan peraturan perundangan (“Peraturan Pemerintah No. 60,” 2008). Selain itu pengendalian internal atas laporan keuangan dapat didefinisikan berdasarkan PMK No. 17/PMK.09/2019, dimana Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan pengendalian yang dipersiapkan secara khusus guna memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan dan kesesuaian laporan keuangan yang telah disusun dengan ketentuan yang berlaku yaitu standar akuntansi pemerintahan (SAP) (Menteri Keuangan, 2019).

## Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan penyampaian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial yang telah dilaksanakan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. (Rahima BR Purba & Azima Medina Amrul, 2017). Akuntabilitas merupakan salah satu cerminan dari pelaksanaan *good government governance*, yang mengharuskan adanya bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh entitas sektor publik kepada publik (Prof. Dr. Mardiasmo, 2018). Hubungan akuntabilitas dengan akuntansi sektor publik yaitu akuntabilitas menyediakan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan dari sebuah aktivitas yang menjadi tanggungjawab dari suatu organisasi. Salah satu bentuk akuntabilitas pada sektor publik adalah laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas yang telah dilakukan entitas sektor publik.

## Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori yang berdasar pada kerangka teori COSO yang dijabarkan dalam pemodelan berupa 5 (lima) komponen yaitu: (COSO, 2013)

- a. Lingkungan Pengendalian yang merupakan kumpulan kriteria, proses dan bentuk sebagai dasar pelaksanaan sistem pengendalian internal di semua level organisasi
- b. Penilaian risiko merupakan proses yang dinamis dan repetitif saat melakukan identifikasi dan penilaian risiko sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana pengelolaan risiko untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Aktivitas pengendalian dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diputuskan melalui kebijakan serta prosedur guna meyakini bahwa mitigasi risiko telah dijalankan di seluruh level organisasi.
- d. Informasi dan komunikasi merupakan hal penting untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Informasi dapat diperoleh dari pihak internal maupun eksternal organisasi untuk menghasilkan data yang relevan dan andal, sementara komunikasi merupakan proses yang berkelanjutan dan repetitif untuk menyediakan, menyampaikan maupun memperoleh informasi yang diperlukan.
- e. Kegiatan pemantauan merupakan evaluasi yang dilakukan secara gabungan maupun terpisah dari masing-masing komponen pengendalian internal guna memastikan implementasi sistem pengendalian internal telah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

## Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan pengendalian internal pada institusi pemerintahan, (Pratama, 2021) melakukan penelitian atas kelemahan pengendalian internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri) dengan merujuk pada kesesuaian terhadap penerapan SPIP berdasar pada PP No. 60 Tahun 2008. Penelitian



lainnya juga dilakukan oleh (Suharto, 2019) yang berfokus pada pengendalian internal atas laporan keuangan tingkat kementerian/lembaga dengan melakukan survei untuk mengetahui persepsi penyusun laporan keuangan untuk melakukan penilaian pengendalian internal dengan menggunakan metode *control self assessment* (CSA) terhadap penerapan *internal control over financial reporting* (ICOFR). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Awalia & Nasution, 2022) yang berfokus pada analisis pengendalian internal dan kesesuaiannya dengan PP No.60 tahun 2008 dengan berfokus pada objek penelitian Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) di Kota Pematang Siantar. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Ramdany & Yusuf Setiawan, 2021) membahas faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan entitas pemerintah, dimana salah satunya mencakup unsur pengendalian internal dengan menggunakan kerangka COSO, namun demikian penelitian menggunakan metode kuantitatif dan tidak hanya berfokus pada unsur pengendalian internal namun membahas faktor lainnya seperti SDM.

Dengan melakukan pengamatan dan perbandingan atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti berharap hasil analisis dari penelitian dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan referensi untuk perkembangan penelitian-penelitian berikutnya.

## METODE

### Strategi Penelitian

Strategi yang dilakukan pada penelitian ini merupakan penggunaan strategi studi kasus yang merupakan metode penelitian yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman atas kasus yang terjadi di dunia nyata dan mengasumsikan bahwa pemahaman umumnya juga terkait dengan keadaan kontekstual yang penting dan memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut, dimana fenomena dan konteks tidak selalu dapat dibedakan secara tajam dalam situasi dunia nyata (Yin, 2018).

Penelitian dengan menggunakan strategi berupa studi kasus dilakukan dengan mengembangkan analisis secara mendalam mengenai suatu studi kasus dari sebuah program ataupun kejadian serta proses yang terbatas oleh aktivitas dan waktu. Pengumpulan informasi secara detail dilakukan oleh penelitian dengan menggunakan berbagai prosedur terkait yang dapat digunakan selama periode waktu berkelanjutan. (Creswell & David Creswell, 2018)

Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian penerapan pengendalian internal atas siklus pelaporan berdasarkan kerangka COSO beserta analisis implementasi pengendalian internal yang telah dilakukan oleh Kemenlu sebagai objek studi kasus yang merupakan *single unit analysis*.

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran penjelasan yang lebih detail terkait dengan fenomena permasalahan yang terjadi pada objek penelitian (Veronika et al., 2022). Fenomena dimaksud berkaitan dengan penggunaan prosedur manual untuk karwas dan penggunaan jurnal manual pada satker Kemenlu khususnya satker Perwakilan RI luar negeri. Penelitian deskriptif memberikan gambaran peristiwa untuk menjawab rumusan permasalahan dari penelitian ini. Penggunaan pendekatan kualitatif ini dilakukan karena pengolahan data akan bersifat *text based* terhadap permasalahan sosial. Selain itu, pengamatan langsung atau observasi juga akan dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian untuk mendapatkan gambaran makna terkait dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan hasil penelitian berupa kesimpulan dari informasi yang telah didapatkan serta berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti guna melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

### Pengumpulan Data

Pengumpulan data secara teknis yang dilakukan untuk menunjang penelitian ini meliputi pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak terkait melalui mekanisme wawancara semi terstruktur kepada pihak-pihak yang



dibuat oleh satker Kemenlu pada tahun 2022 meningkat bila dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah jurnal manual yang dibuat sebanyak 10.507 sementara pada tahun 2022 sebanyak 13.371. Data tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan periode penjurnalan antara tahun 2021 dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2021, terdapat 10 periode penjurnalan yang dilakukan oleh satker Kemenlu sementara pada tahun 2022 terdapat 11 periode penjurnalan yang juga mencakup periode *Unaudited* yang merupakan periode perbaikan untuk melakukan koreksi atas transaksi periode sebelumnya dan periode *Audited* yang merupakan periode penjurnalan untuk mencatat transaksi koreksi BPK RI. Baik pada tahun 2021 maupun 2022, terdapat penjurnalan yang dilakukan di luar pola penjurnalan yang telah ditetapkan yaitu pada penyusunan laporan keuangan semester I (Juni), Triwulan III (September) dan Tahunan (Desember).

Tabel 1. Perbandingan Data Jumlah Jurnal Manual Kemenlu Tahun 2022 dan 2022

No	Periode Penjurnalan 2022	Jumlah Jurnal Manual yang direkam Tahun 2022	Jumlah Satker yang melakukan penjurnalan Tahun 2022	Periode Penjurnalan 2021	Jumlah Jurnal Manual yang direkam Tahun 2021	Jumlah Satker yang melakukan penjurnalan Tahun 2021
1	Januari 2022	27	8	Januari 2021	25	12
2	Mei 2022	4	1	Februari 2021	3	2
3	Juni 2022	2278	130	Maret 2021	1	1
4	Juli 2022	1537	94	Juni 2021	3301	139
5	Agustus 2022	165	9	Juli 2021	91	30
6	September 2022	3055	128	Agustus 2021	2	2
7	Oktober 2022	170	29	September 2021	2847	132
8	November 2022	2	1	Oktober 2021	78	18
9	Desember 2022	1242	128	November 2021	27	4
10	Desember 2023 Periode 13 ( <i>Unaudited</i> )	4661	129	Desember 2021	4132	143
11	Desember 2023 Periode 14 ( <i>Audited</i> )	230	52			
<b>Total Jurnal</b>		<b>13371</b>			<b>10507</b>	

Sumber: Data Jurnal Manual SAKTI, diolah kembali

Teknik penelitian lainnya yang dilakukan adalah teknik observasi yang dilakukan dengan mengamati proses penyusunan laporan keuangan. Dari hasil observasi yang dilakukan saat penyusunan laporan keuangan triwulan diketahui bahwa apabila terdapat kesalahan penjurnalan yang dilakukan pada suatu periode akan dilakukan perbaikan/koreksi pada periode berikutnya. Hal ini dikarenakan adanya masa tutup periode dimana seluruh data transaksi dari seluruh kementerian/lembaga ditutup untuk dapat dikonsolidasi dan menghasilkan laporan keuangan tingkat kementerian. Masa tutup periode pada tahun 2021 belum diterapkan secara otomatis karena belum menggunakan SAKTI namun pada tahun 2022 masa tutup periode dilakukan otomatis sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penjurnalan hanya dapat dilakukan sebelum masa periode tutup buku, apabila masih terdapat penjurnalan yang belum sempat dilakukan maka harus dilakukan pada periode berikutnya. Hal ini yang menyebabkan periode penjurnalan yang tidak sesuai dengan pola yang telah ditetapkan.

## PEMBAHASAN

Keseluruhan teknik pengumpulan data tersebut kemudian diolah serta dianalisis, sehingga dapat diketahui informasi-informasi di antaranya bahwa organisasi, laporan keuangan dan informasi menjadi tiga kata yang paling sering disebutkan oleh responden melalui teknik wawancara. Ketiga kata tersebut pada prinsipnya saling berkaitan satu sama lain, khususnya menyangkut penelitian ini. Laporan keuangan suatu organisasi memberikan informasi yang andal, akurat dan berkualitas terkait dengan organisasi. Kerangka COSO yang mencakup komponen lingkungan pengendalian menjadi dasar untuk pengendalian internal diketahui bahwa komitmen pimpinan, keteladanan pimpinan, aturan kode etik, jalur pelaporan, struktur organisasi hingga pembinaan SDM menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sebagai bentuk dari lingkungan pengendalian internal yang kondusif sehingga dapat menciptakan pengendalian internal yang efektif. Begitu pula dengan unsur lingkungan pengendalian telah menunjukkan reaksi positif dari responden dimana responden telah mengetahui, menerapkan dan menyadari adanya lingkungan pengendalian yang telah terbangun dengan baik.

Begitu pula dengan komponen penilaian risiko, organisasi juga memegang peranan penting untuk dapat mengidentifikasi risiko dengan mengklasifikasikannya sesuai kriteria dan tindakan penanganan risiko yang telah ditetapkan, adanya pertimbangan potensi kecurangan, dan penetapan aktivitas pengendalian. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan responden, belum semua dari responden mengetahui mengenai penilaian risiko, kriteria risiko dan tindakan penanganan risiko. Secara garis besar beberapa responden mengetahui mengenai penilaian risiko pengendalian internal secara umum, namun untuk lingkup yang lebih kecil yaitu siklus pelaporan ataupun yang berkaitan dengan laporan keuangan, responden menyatakan belum mengetahuinya. Hal ini menunjukkan belum adanya informasi yang tersampaikan secara menyeluruh terkait dengan penilaian risiko.

Hasil wawancara terkait dengan komponen kegiatan pengendalian menunjukkan jawaban yang positif, dimana responden telah mengetahui, memahami dan menerapkan bahwa telah terdapat pemisahan kewenangan, pembatasan hak akses dan kebijakan serta prosedur dalam hal pelaksanaan kegiatan pengendalian. Menurut responden komponen kegiatan pengendalian sudah berjalan cukup efektif.

Responden juga memberikan informasi terkait komponen komunikasi dan informasi juga cukup direspon positif, dimana komunikasi dilakukan tidak hanya melalui jalur formal seperti surat, memorandum, nota dinas, berita rahasia, ataupun berita biasa namun juga dilakukan melalui jalur informal seperti menggunakan media *Whatsapp*, *Zoom Meeting* dan *Googledrive*. Jalur komunikasi ini dilakukan untuk pertukaran data dan informasi terkait laporan keuangan baik dengan pihak internal maupun eksternal. Pertukaran data dan informasi dengan mempertimbangkan perbedaan jarak, waktu, wilayah dan kondisi satker perwakilan RI luar negeri menjadikan media informal mengambil peran penting karena dapat diakses tanpa batasan waktu ataupun jarak. Namun demikian responden juga memberikan perhatian terhadap keamanan data terutama melalui jalur komunikasi informal. Selain itu prosedur manual yang dilakukan atas karwas maupun jurnal manual sebagai bagian dari data informasi juga menjadi perhatian karena berdampak pada potensi kesalahan *human error* yang mungkin terjadi.

Para responden memberikan respon yang masih perlu menjadi perhatian yang berkaitan dengan komponen pemantauan. Responden menyampaikan bahwa evaluasi mandiri belum dilakukan secara optimal, sehingga masih dilakukan berjenjang. Begitu pula dengan pemantauan dalam bentuk rekonsiliasi, meskipun telah dilakukan rekonsiliasi namun bila ditemukan kesalahan baik atas karwas maupun jurnal manual maka perbaikan/koreksi akan dilakukan pada periode setelahnya.

Analisis hasil dokumentasi menunjukkan mengenai semakin bertambahnya jurnal koreksi yang dilakukan pada tahun 2022, bila dikombinasikan dengan hasil observasi dan wawancara terdapat keselarasan dalam hal penjurnalan manual dimana bila ditemukan adanya kesalahan/



*human error* baik pada karwas ataupun jurnal manual maka perbaikan akan dilakukan pada periode berikutnya. Begitu pula bila penjurnalan manual tidak sempat dilakukan pada periode sebelum tutup buku maka akan dilakukan pada periode berikutnya. Hal ini memunculkan ketidaktertiban periode penjurnalan. Ketidaktertiban dalam penjurnalan menunjukkan bahwa terdapat koreksi/perbaikan yang dilakukan pada periode berikutnya, dalam hal ini pengendalian internal belum berjalan secara efektif karena ketidaktertiban periode penjurnalan masih muncul dari waktu ke waktu. Implementasi SAKTI yang mencakup pemisahan periode *Unaudited* dan *Audited* pada tahun 2022 membuat perbaikan/koreksi penjurnalan yang dilakukan atas periode sebelumnya semakin terlihat. Hal ini menunjukkan Laporan keuangan yang belum menyajikan informasi dan data yang akurat karena masih terdapat perbaikan penjurnalan yang dilakukan pada periode berikutnya. Bila dikaitkan dengan hasil wawancara dengan responden, kegiatan pemantauan belum dapat berjalan secara efektif sehingga masih terjadi perbaikan/koreksi setelah masa penyusunan laporan keuangan. Periode *Audited* yang merupakan periode akhir setelah pemeriksaan BPK menjadi periode final koreksi dan hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pengendalian siklus laporan keuangan hanya laporan keuangan *Audited* yang dapat menyajikan data yang akurat setelah melewati proses perbaikan/koreksi dalam satu tahun. Berkaitan dengan akuntabilitas, laporan keuangan *Audited* yang dipublikasikan kepada masyarakat merupakan dimana akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas yang telah dilakukan entitas sektor publik. Laporan keuangan *Audited* telah melewati berbagai proses pengendalian, termasuk koreksi/perbaikan dari BPK untuk dapat menyajikan data serta informasi yang akurat, relevan, dan akuntabel.

### KESIMPULAN

Penelitian ini berawal dari adanya fenomena prosedur manual yang dilakukan dalam siklus pelaporan yang meliputi karwas dan perekaman jurnal serta jumlah jurnal yang direkam oleh satker perwakilan RI luar negeri yang cukup banyak setiap tahunnya. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Kemenlu telah berupaya menerapkan pengendalian internal terhadap siklus pelaporan, dimana telah terdapat respon positif dari responden terhadap komponen lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian, namun tidak demikian dengan komponen penilaian risiko, komunikasi dan informasi serta pemantauan, yang masih belum optimal.

Selaras dengan hal tersebut, prosedur manual yang masih dilakukan atas karwas serta perekaman jurnal yang jumlahnya cukup banyak menimbulkan kesalahan/*human error* yang dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan ketidaktertiban penjurnalan yang dilakukan di luar periode penyusunan laporan keuangan dan jumlah jurnal koreksi yang cukup banyak. Hal ini berpengaruh terhadap data yang tersaji pada laporan keuangan semester dan triwulan. Hanya laporan keuangan *Audited* yang mencakup data periode *Audited* yang menyajikan data final setelah koreksi/perbaikan BPK. Perbaikan/koreksi data baik koreksi karwas maupun koreksi jurnal yang dilakukan pada periode berikutnya menunjukkan bahwa pengendalian internal atas siklus pelaporan yang diterapkan belum berjalan secara efektif.

Untuk itu, guna menunjang efektivitas pengendalian internal atas siklus pelaporan yang akan berpengaruh terhadap data yang tersaji pada laporan keuangan, bentuk rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya digitalisasi karwas dan interkoneksi jurnal otomatis pada SAKTI untuk mengurangi prosedur manual yang harus dilakukan. Digitalisasi karwas dan interkoneksi jurnal otomatis pada SAKTI akan mengurangi potensi kesalahan/*human error* yang akan terjadi juga mengurangi ketidaktertiban penjurnalan yang dilakukan pada periode yang tidak seharusnya. Dengan digitalisasi dan otomatisasi sistem, pengendalian internal siklus pelaporan dapat lebih mudah diterapkan dan akan lebih efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Prodi Magister Akuntansi FEB-UI, Dosen pembimbing, dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## REFERENSI

- Amriani, T. N., & Iskandar, A. (2019). Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1). <https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.409>
- Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022). Implementasi Aplikasi SAKTI dan SPAN Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Informatika*, 1(2).
- Awalia, M., & Nasution, J. (2022). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKD Kota Pematangsiantar. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1). <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i1.2045>
- COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework*.
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (n.d.). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Kementerian Luar Negeri. (2022). Laporan Keuangan *Audited* untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., CA. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan. (2019). Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Menteri Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- Menteri Luar Negeri. (2021). Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja.
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No.60 Tahun 2008) dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(2). <https://doi.org/10.33830/jom.v7i2.95.2011>
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. (2008). Sistem Pengendalian Intern.
- Prabowo, N. T. (2017). Analisis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Pendekatan *Technology Acceptance Model*. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.27>
- Pratama, A. (2021). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dalam Siklus Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 2(2), 125–150. <https://doi.org/10.28932/jafta.v2i2.3281>
- Putranto, R. B. (2020). Implementasi *Mobile Application* Akuntansi UKM Pada UMKM Sektor Industri Cokelat Olahan. *Simposium Nasional Keuangan Negara* (Issue 273).
- Rahima BR Purba, & Azima Medina Amrul. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas

Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1).

Ramdany, & Yusuf Setiawan. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 10(1).

Romney, M. B., Steinbart, P. J., Summers, S. L., & Wood, D. A. (2021). *Accounting Information System, 15th Edition* (15th Edition). Pearson Education Limited.

Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar Profesional Akuntan Publik Standar Audit 450.

Suharto, D. (2019). Persepsi Pengelola Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Negara. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 2(3).  
<https://doi.org/10.31685/kek.v2i3.399>

Veronika M. W., Putri, A. M., & Suci, R. G. (2022). Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penata Usaha Anggaran Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. *ACCOUNTIA JOURNAL (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 6(2).

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods. Sixth Edition*. In *SAGE Publications* (Vol. 53, Issue 5).